
Analisis Tingkat Kematangan *Website* Utama Pemerintah Kabupaten Takalar Menggunakan Pendekatan *Maturity Model E-Government*

Muh Fadli Fauzi Sahlan^{1*}, Abdillah SAS²

^{1,2}Teknologi Informasi/Universitas Bosowa

¹Email: fadli.fauzi@universitasbosowa.ac.id

²Email: abdillah.sas@universitasbosowa.ac.id

*) Corresponding Author

ABSTRACT

Implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) is a primary mandate for the government in Indonesia to enhance transparency and public service quality, with websites serving as the forefront. This research aims to analyze the maturity level of the official website of the Takalar Regency Government (takalarkab.go.id) using an adaptive evaluation model formulated based on guidelines from the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), particularly Minister of Kominfo Regulation No. 4 of 2024 and the SPBE evaluation framework. The research method employed is qualitative content analysis with a case study approach. Data were collected through systematic observation and documentation of features on the main website and its associated portals, such as LPSE and Satu Data. The analysis results indicate that the Takalar Regency Government's website has effectively reached the Information level and partially the Interaction level. The site is proficient in presenting news, leadership profiles, and providing complaint channels. However, a significant gap exists in reaching the Transaction and Collaboration levels. The main finding is the presence of digital fragmentation, where crucial data and services like the General Procurement Plan (RUP), accountability data (LAKIP), and strategic datasets are scattered across siloed portals that are not effectively integrated with the main website. This fragmentation impedes the website's progression to higher maturity levels. This study recommends a strategy of information centralization, transactional service development, and optimization of an integrated data portal to create a cohesive digital ecosystem.

Keywords: *E-Government, Kabupaten Takalar, Maturity Model, Website*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk mengimplementasikan e-government, dengan website sebagai salah satu kanal utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan portal utama website Pemerintah Kabupaten Takalar (mail.takalarkab.go.id) menggunakan pendekatan model kematangan e-government. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten kualitatif berdasarkan kriteria Model Kematangan E-Government Gartner yang diadaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website Pemerintah Kabupaten Takalar berada pada tahap Informasi yang solid dan Interaksi awal, efektif dalam diseminasi berita dan pengumuman publik. Namun, website ini masih memiliki keterbatasan signifikan pada tahap Transaksi dan Transformasi, dengan minimnya layanan transaksional penuh dan integrasi sistem antar-lembaga pada portal utama. Temuan ini konsisten dengan pola umum tantangan e-government di pemerintah daerah Indonesia. Rekomendasi strategis mencakup peningkatan fitur interaksi dan transaksional, mengatasi fragmentasi layanan digital, serta penguatan faktor pendukung seperti komitmen kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia.

Kata Kunci: *E-Government, Kabupaten Takalar, Maturity Model, Website*

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital di sektor publik melalui implementasi e-Government merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di Indonesia, komitmen ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong terciptanya birokrasi yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan layanan publik yang berkualitas dan terpercaya [1]. Dalam konteks ini, situs web resmi pemerintah daerah menjadi kanal utama interaksi digital antara pemerintah dan masyarakat.

Meskipun berbagai kebijakan nasional telah mendorong digitalisasi layanan publik, kenyataannya banyak situs web pemerintah daerah di Indonesia masih belum menunjukkan performa yang optimal. Situs-situs tersebut cenderung berfungsi sebatas media informasi satu arah dan belum berkembang menjadi platform layanan yang interaktif, transaksional, maupun kolaboratif. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, keterlambatan layanan, serta kesenjangan dalam integrasi data antarlembaga. Fenomena ini tidak terlepas dari tantangan umum seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya komitmen kepemimpinan, serta fragmentasi sistem digital yang berjalan sendiri-sendiri. Kondisi serupa juga ditemukan di Kabupaten Takalar, di mana situs web resmi pemerintah daerah (takalarkab.go.id) baru mampu menyediakan layanan dasar berupa penyebaran informasi dan kanal pengaduan, namun belum mengakomodasi kebutuhan layanan yang bersifat transaksional dan terpadu. Portal-portal penting seperti LPSE dan Satu Data masih berjalan terpisah dan belum terintegrasi dengan baik, sehingga menyebabkan layanan publik digital yang ditampilkan bersifat parsial dan belum efisien.

Penelitian ini penting dilakukan karena situs web pemerintah daerah merupakan wajah utama pelayanan publik berbasis digital dan menjadi indikator kematangan implementasi e-Government. Jika kondisi stagnan ini dibiarkan, maka tujuan dari SPBE untuk menciptakan birokrasi yang transparan, efisien, dan berbasis data tidak akan tercapai. Selain itu, tanpa evaluasi berbasis model kematangan yang sistematis, pemerintah daerah akan kesulitan mengidentifikasi area prioritas perbaikan dan merancang strategi pengembangan layanan digital yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan memetakan posisi aktual situs web Pemerintah Kabupaten Takalar, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis agar layanan publik digital dapat berkembang menuju tingkat kematangan yang lebih tinggi dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Penilaian kemajuan implementasi e-Government dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluatif melalui model kematangan (*maturity model*). Salah satu model yang relevan dan banyak digunakan adalah Gartner's E-Government Maturity Model, yang mengelompokkan perkembangan layanan digital ke dalam lima tingkat: Informasi, Interaksi, Transaksi, Kolaborasi, dan Optimum [2]. Model ini telah banyak diadaptasi oleh instansi pemerintah daerah dalam kerangka evaluasi SPBE [3]. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2024 [4] yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penilaian layanan berbasis TIK di daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan situs web resmi Pemerintah Kabupaten Takalar berdasarkan kerangka evaluasi adaptif yang disusun dari pedoman Kominfo dan model kematangan e-Government. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan struktur layanan digital yang ada, termasuk sejauh mana integrasi antarsistem telah berjalan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis berupa pengembangan fitur interaktif dan transaksional, integrasi layanan digital ke dalam satu portal terpadu (*single gateway*), serta optimalisasi data publik melalui portal Satu Data Kabupaten Takalar.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten (*content analysis*) dan studi kasus pada situs web Pemerintah Kabupaten Takalar. Pendekatan ini dipilih untuk dapat menggali secara mendalam konten, fitur, fungsionalitas, dan keterhubungan antar platform digital yang ada [5].

1. Model Evaluasi Adaptif

Model kematangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi adaptif yang disintesis dari beberapa sumber utama:

- Prinsip-prinsip SPBE: Berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018 yang menekankan pada domain Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan.
- Pedoman Kominfo: Merujuk pada semangat Peraturan Menteri Kominfo No. 4 Tahun 2024 yang menjadi acuan penyelenggaraan TIK di daerah.
- Kerangka Operasional: Mengadaptasi struktur evaluasi SPBE yang digunakan di tingkat pemerintah daerah (contoh: Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 813 Tahun 2024) [6], yang secara praktis menguraikan tingkatan kematangan.

Model ini mengukur kematangan layanan digital dalam lima tingkatan optimalisasi, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Optimalisasi Layanan E-Government

Tingkat	Kriteria	Deskripsi
1	Informasi	Situs web menyajikan informasi statis dan dinamis satu arah (dari pemerintah ke publik). Contoh: berita, profil, regulasi.
2	Interaksi	Adanya fitur komunikasi dua arah. Publik dapat berinteraksi atau meminta informasi. Contoh: formulir kontak, email, media sosial, kanal pengaduan.
3	Transaksi	Pengguna dapat menyelesaikan seluruh proses layanan secara online, termasuk proses pembayaran jika ada. Contoh: pengajuan izin online, pembayaran pajak daerah online.
4	Kolaborasi	Terjadi integrasi data dan proses bisnis antar lembaga/OPD secara horizontal maupun vertikal. Situs web utama menjadi gerbang terpadu (<i>single gateway</i>).
5	Optimum	Layanan bersifat proaktif dan personal. Kebijakan pemerintah didasarkan pada analisis data (<i>data-driven</i>) yang terintegrasi penuh.

2. Pengumpulan dan Analisis Data

Subjek dalam penelitian ini adalah platform digital Pemerintah Kabupaten Takalar yang meliputi situs utama (<https://takalarkab.go.id>), portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE (<https://lpse.takalarkab.go.id>), dan portal Satu Data Kabupaten Takalar (<https://satudata.takalarkab.go.id>). Adapun objek penelitian adalah tingkat kematangan layanan digital yang dimiliki oleh ketiga platform tersebut, yang dianalisis berdasarkan model evaluasi kematangan e-Government yang disesuaikan dari pedoman SPBE dan regulasi Kominfo [4]. Pengumpulan data dilakukan pada bulan juni 2025 melalui observasi dan penelusuran sistematis terhadap:

- Situs web utama: <https://takalarkab.go.id/>
- Portal LPSE: <https://lpse.takalarkab.go.id/>

c. Portal satu data: <https://satudata.takalarkab.go.id>

Data yang dikumpulkan mencakup ketersediaan konten wajib (profil, struktur organisasi, berita), fitur interaktif, tautan kelayanan lain dan ketersediaan data transparansi (LAKIP, RUP, data keuangan). Analisis dilakukan dengan memetakan bukti-bukti yang ditemukan ke dalam kriteria pada setiap tingkat kematangan untuk menentukan level pencapaian situs web. Untuk mengoperasionalkan kelima tingkat kematangan, penelitian ini menetapkan serangkaian indikator penilaian yang spesifik dan dapat diamati yang disajikan pada Tabel 1. Indikator ini berfungsi sebagai daftar periksa (*checklist*) dalam proses analisis konten. Keberadaan atau ketiadaan fitur yang sesuai dengan indikator ini pada situs web menjadi dasar penentuan tingkat kematangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL

Analisis terhadap situs web Pemerintah Kabupaten Takalar dan portal terkait menghasilkan temuan yang terbagi berdasarkan tingkat kematangan layanan [7]. Hasil temuan dapat dilihat dalam Tabel 2 [8] [9].

Tabel 2. Analisis Tingkat Kematangan Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar

Tingkat Kematangan	Status Pencapaian	Kekuatan	Kelemahan / Kesenjangan
Tingkat 1: Informasi	Tercapai Sebagian Besar	<ul style="list-style-type: none"> Tampilan situs modern dan responsif. Konten berita (news feed) diperbarui secara rutin. Informasi dasar (Visi & Misi, Profil Pimpinan, Info OPD) tersedia. Tautan media sosial aktif, terutama kanal YouTube "Takalar TV". 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen transparansi bernilai tinggi (LAKIP, RUP, Laporan Keuangan) sulit ditemukan atau tidak tersedia di portal utama. Tidak ada menu khusus untuk dokumen akuntabilitas. Informasi esensial untuk pengawasan publik belum menjadi prioritas.
Tingkat 2: Interaksi	Tercapai Sebagian	<ul style="list-style-type: none"> Terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! dan Whistle Blowing System (WBS) untuk pengaduan resmi. Media sosial membuka ruang interaksi informal. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada fitur interaksi mendalam seperti forum diskusi publik atau <i>live chat</i>. Interaksi cenderung bersifat reaktif (menanggapi aduan) daripada proaktif (mengajak partisipasi publik).
Tingkat 3: Transaksi	Tidak Tercapai	-	<ul style="list-style-type: none"> Kesenjangan paling signifikan.

Tingkat Kematangan	Status Pencapaian	Kekuatan	Kelemahan / Kesenjangan
			<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada layanan publik yang dapat diselesaikan sepenuhnya secara online (contoh: pengajuan izin, pembayaran PBB, retribusi). Pengguna hanya mendapat informasi, eksekusi layanan harus di kantor fisik.
Tingkat 4 & 5: Kolaborasi & Optimum	Tidak Tercapai	-	<ul style="list-style-type: none"> Data Pengadaan: Berada di portal terpisah (lpse.takalarkab.go.id) dan tidak terintegrasi ke situs utama. Data Terbuka: Portal satudata.takalarkab.go.id masih dalam tahap awal dengan jumlah dataset terbatas dan belum mencakup data strategis. Tidak Ada Gerbang Tunggal (Single Gateway): Situs utama belum berfungsi sebagai portal terpadu; pengguna harus mengunjungi berbagai URL berbeda untuk layanan spesifik.

2. PEMBAHASAN

Observasi dilakukan secara sistematis pada bulan Juni 2025 dengan cara menelusuri menu, fitur, konten, dan fungsionalitas pada masing-masing situs. Penilaian didasarkan pada pengamatan aktual terhadap elemen-elemen situs yang tersedia secara public [10].

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Observasi

Tingkat Kematangan	Jumlah Indikator	Indikator Terpenuhi	Skor (%)	Status
Informasi	5	4	80%	Tercapai Sebagian Besar
Interaksi	4	2	50%	Tercapai Sebagian
Transaksi	4	0	0%	Tidak Tercapai

Kolaborasi	3	0	0%	Tidak Tercapai
Optimum	3	0	0%	Tidak Tercapai

Penilaian dilakukan menggunakan metode skoring sederhana berbasis observasi fitur. Setiap fitur atau indikator diberi skor sebagai berikut:

0 = Tidak tersedia

1 = Tersedia dan berfungsi

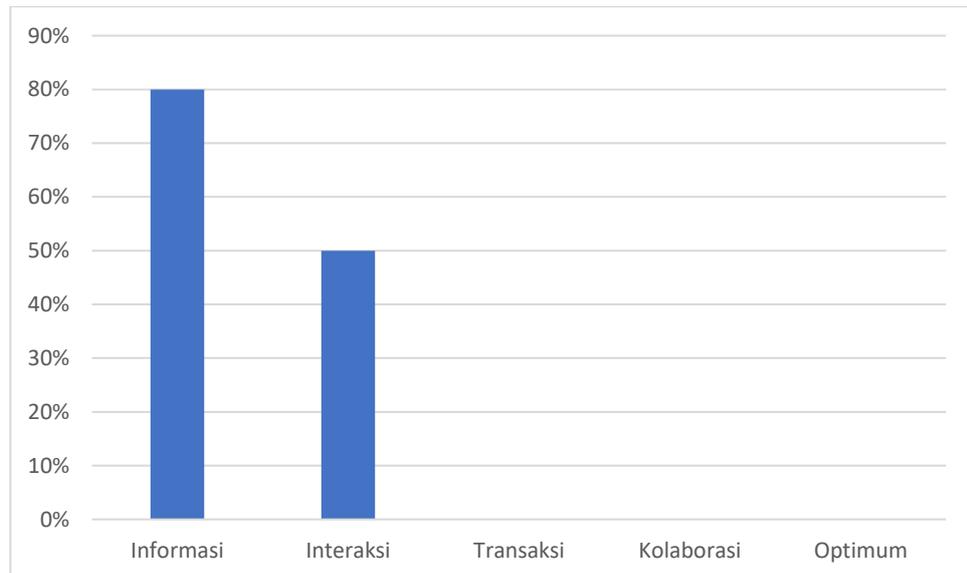
Rumus untuk menghitung skor tiap tingkat kematangan:

$$\text{Skor (\%)} = (\text{Jumlah Indikator Terpenuhi} / \text{Jumlah Total Indikator}) \times 100\%$$

Dari Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat kematangan website <https://takalarkab.go.id> masih berada pada tahap awal. Situs ini kuat dalam penyajian informasi dasar, namun masih memiliki kesenjangan yang signifikan pada tingkat interaksi yang lebih dalam, layanan transaksi, dan integrasi data.

Tabel 3. Indikator Ketercapaian Kriteria

Rentan Skor %	Tingkat Kematangan
80 – 100 %	Tercapai
40 – 79 %	Tercapai Sebagian
0 – 39 %	Tidak Tercapai



Gambar 1. Grafik Ketercapaian Kriteria E-Government untuk Tingkat Kematangan Pemerintah Daerah Kab. Takalar

Salah satu temuan utama yang menjadi hambatan dalam peningkatan tingkat kematangan website adalah adanya fragmentasi digital. Fragmentasi digital merujuk pada kondisi di mana data, informasi, dan layanan publik tersebar di berbagai portal atau sistem informasi yang berjalan secara terpisah tanpa integrasi yang memadai. Dalam konteks Kabupaten Takalar, informasi strategis seperti Rencana Umum Pengadaan (RUP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta data terbuka (open data) tidak tersedia atau tidak terhubung secara langsung melalui situs utama (takalarkab.go.id). Sebaliknya, pengguna diarahkan ke portal

terpisah seperti LPSE dan Satu Data yang pengelolaannya terpisah dan tidak terintegrasi secara sistematis.

Kondisi ini menyebabkan pengalaman pengguna menjadi tidak efisien, menurunkan transparansi, serta menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan dan informasi yang seharusnya mudah dijangkau. Selain itu, fragmentasi ini menghambat situs utama untuk berfungsi sebagai single gateway yakni satu pintu masuk layanan digital pemerintah yang menjadi ciri utama dari level kematangan tertinggi (Kolaborasi dan Optimum). Tanpa adanya arsitektur sistem yang terintegrasi, situs pemerintah daerah akan sulit bertransformasi menjadi portal layanan publik yang holistik, adaptif, dan berbasis data. Oleh karena itu, fragmentasi digital merupakan tantangan fundamental yang perlu segera diatasi melalui integrasi teknis, konsolidasi manajemen antar-OPD, serta penguatan tata kelola SPBE secara menyeluruh.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis menggunakan model evaluasi adaptif berbasis pedoman Kominfo, disimpulkan bahwa situs web resmi Pemerintah Kabupaten Takalar per Juni 2025 berada pada **Tingkat 1 (Informasi) menuju Tingkat 2 (Interaksi)**. Situs ini berhasil sebagai media diseminasi informasi dan kanal pengaduan dasar, namun gagal mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi (Transaksi dan Kolaborasi).

Tidak optimalnya bentuk pelayanan e-government berdasarkan tingkat kematangan dari indikator yang ditetapkan disebabkan oleh **fragmentasi digital**, di mana data dan layanan krusial tersebar pada portal-portal yang terisolasi dan tidak terintegrasi dengan baik ke dalam situs web portal utama. Hal ini menghambat terwujudnya layanan publik yang efisien, transparan, dan terpadu sesuai amanat SPBE. Untuk itu penulis merekomendasikan beberapa langkah yang mungkin bisa diterapkan seperti:

1. **Sentralisasi Informasi Akuntabilitas:**
Mengintegrasikan dan menampilkan secara jelas tautan beserta ringkasan dokumen transparansi kunci (LAKIP, RUP, Laporan Keuangan) pada menu khusus di portal takalarkab.go.id.
2. **Pengembangan Layanan Transaksional Prioritas:**
Membuat peta jalan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan minimal satu layanan transaksional penuh, misalnya layanan perizinan usaha mikro atau pendaftaran kependudukan dasar.
3. **Optimalisasi dan Promosi Portal Satu Data:**
Mendorong seluruh OPD untuk secara aktif mempublikasikan dataset bernilai tinggi ke portal satudata.takalarkab.go.id dan mempromosikannya melalui situs web utama.
4. **Implementasi Arsitektur SPBE Terpadu:**
Merancang ulang arsitektur informasi agar takalarkab.go.id berfungsi sebagai gerbang layanan tunggal (*single service gateway*), yang menyediakan akses terpadu ke semua layanan digital pemerintah daerah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Annone, "Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," Sekretariat Negara, Jakarta, 2018.
- [2] A. W. and H. , "valuasi Tingkat Kematangan e-Government Pada Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Publik Menerapkan Framework Gartner," *Jurnal Media Informatika Budidarma*, pp. 99-107, 2021.

- [3] M. and S. , "Pengaruh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah," *Journal of Management*, pp. 978-986, 2025.
- [4] K. K. d. I. R. Indonesia, "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika," Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2024.
- [5] Keban, "odelling E-Government Maturity Determinants at the Local Level in Indonesia Using Technology-Organization-Environment Framework," *Jurnal Sosial dan Politik UGM*, 2024.
- [6] P. P. S. Barat, "Keputusan Gubernur Nomor 813 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah," Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, 2024.
- [7] P. K. Takalar, "Portal Satu Data Kabupaten Takalar," 2025.
- [8] P. K. Takalar, "Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Takalar," 2025. [Online]. Available: <https://takalarkab.go.id/>.
- [9] "Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Takalar," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2025. [Online]. Available: <https://lpse.takalarkab.go.id/eproc4/>.
- [10] C. O. R. and R. , "eran sistem pemerintah berbasis elektronik (spbe) dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di indonesia," *Sosio Yustisia*, pp. 71-95, 2023.
- [11] Adu, H. and F. , "Hambatan-hambatan dalam Implementasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) pada pemerintah daerah," *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, pp. 215-223, 2022.